ANALISIS KEBIJAKAN SOSIAL TENTANG KEBERADAAN PEDAGANG KAKI LIMADIJALAN DAYA NASIONAL(KOMPLEK UNTAN)KOTA PONTIANAK

(Analysis of Social Policies Regarding the Presence of Street Vendors on the Daya Nasional Street (Universitas Tanjungpura Complex) Pontianak City)

Oleh :

TAHIR¹
NIM. E1021141079

Herlan², Syf Ema Rahmania²
Surel : e1021141079@untan.ac.id

1. Mahasiswa Program Studi Pembangunan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dosen Program Studi Pembangunan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.

Abstrak

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dalam menangani pedagang kaki lima di jalan Daya Nasional (Komplek Universitas Tanjungpura) Kota Pontianak serta mengungkapkan bagaimana respon masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah. Daerah ini cukup menarik untuk diteliti mengingat masih banyaknya terdapat pedagang kaki lima yang berjualan di tempat yang kurang tepat, seperti di atas trotoar atau di bahu jalan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang dilakukan sebagai suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran dengan menggunakan metode ilmiah. Sedangkan dasar metode penelitian deskriptif adalah suatu pendekatan untuk mengangkat fakta, variabel, dan fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan. Mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri No 41 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima maka Pemerintah Kota Pontianak menetapkan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum yang salah satu isinya 'Setiap orang atau badan dilarang mendirikan bangunan, kios, tenda, atau sejenisnya di atas trotoar, sungai, parit, saluran pembuangan air, di pinggir jalan dan/atau di atas badan jalan, di atas tanah fasilitas sosial (fasos) atau fasilitas umum (fasum) untuk berjualan/berdagang atau keperluan lainnya kecuali mendapat izin dari Pemerintah Daerah.

Kata kunci: Analisis; Kebijakan Pemerintah; Pedagang Kaki Lima.

Abstract

This research writing was meant to deliver description about government's policy in handling street vendors at Daya Nasional Street (Universitas Tanjungpura complex) Pontianak City, also to reveal the responds and hopes of the community toward the government's policy. The location was quiet interesting to be researched remembering that there were still many street vendors selling things at the inappropriate spots, such as at above sidewalks or roadsides. The approach used in this research was descriptive approach which is a research done as an effort to find, develop, and test the truth using scientific method. Whereas the basic method of descriptive research is an approach to lift up the facts, variables and phenomena which is existed in the field ground. The regulation refers to Ministerial Decree of the Minister of Home Affairs Number 41 of 2012 on Structuring and Empowerment of Street Vendors, then the Pontianak government implements the Regional Regulation Number 11 of 2019 on Public Order which one of the contents states "any individual or institution is forbidden to build building, stall, tend, or the like on the sidewalks, rivers, trenches, waterways, roadsides, and social or public facilities to sell things or any other necessities but owning the permit from Local government.

Keywords: Analysis, Government's Policy, Street Vendor.

A. Pendahuluan

Fenomena keberadaan sektor informal merupakan fenomena yang cukup banyak terjadi dan berkembang di beberapa kota di Indonesia, salah satunya keberadaan pedagang kaki lima di Kota Pontianak. Hambali dkk (2016: 18) menyebutkan bahwa, keberadaan pedagang kaki lima di pusat pertumbuhan ekonomi dan di pusat-pusat perkotaan sekarang ini menjadi masalah yang urgen untuk diperhatikan. Keberadaan mereka acapkali dinilai sebagai faktor penghambat program tata letak dan tata ruang kota yang dilakukan oleh kebanyakan pemerintah daerah di Indonesia, diantaranya keberadaan mereka dianggap sebagai pengganggu fasilitas publik, memakai hak publik dalam hal trotoar jalan atau yang lebih kita kenal dengan istilah kembang trotoar.

Berbagai macam bentuk sarana perdagangan yang dipergunakan oleh para pedagang kaki lima sangat bervariasi, mulai dari gelaran beralas tikar, meja selaras panjang beratap, kios-kios kecil, warung semi permanen, gerobak kereta dorong, sepeda, sepeda motor, mobil/pickup yang dimodifikasi sedemikian rupa, dan masih banyak lagi

macam-macam sarana lainnya yang digunakan oleh pedagang kaki lima untuk menjajakan dagangan mereka. Secara keseluruhan dagangan yang ditawarkan pedagang kaki lima berupa barang-barang kelontong, berbagai jenis makanan dan minuman instan.

Fenomena ini dapat kita lihat di beberapa tempat kota Pontianak seperti di sepanjang jalan, trotoar, depan pertokoan, dan lain sebagainya. Berdiri bangunan-bangunan yang di buat oleh para pedagang yang nyaris sampai ke badan jalan dengan berbagai macam dagangan yang dijual. Melihat menjamurnya pedagang kaki lima di kota Pontianak, agar tidak menjadi masalah bagi suatu daerah seperti halnya mengganggu keamanan dan keindahan kota maka pemerintah telah membuat sebuah kebijakan.

Dalam Paragraf 8 pasal 30 (Peraturan Daerah Kota Kota Pontianak Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak tahun 2013-2033) bahwa (peruntukan ruang kegiatan sektor informal bagi PKL di tempatkan di bagian Kawasan Pusat Perdagangan Nusa Indah, Pasar Tengah, Pasar Kapuas, Pasar Siantan, Kawasan Pujasera, sekitar pasar, terminal, pelabuhan, tempat rekreasi

Kawasan Wisata Tugu Batu Layang dan Kawasan Pusat Kuliner di Kelurahan Darat Sekip dan Benua Melayu Darat, pemanfaatan ruas jalan pada waktu-waktu tertentu yang diatur melalui Peraturan Walikota).

Berdasarkan data Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2019, tercatat data pedagang kaki lima di Kota Pontianak berjumlah 1241 dengan berbagai macam pedagang kaki lima.

Demikian halnya dengan keberadaan pedagang kaki lima yang ada di lingkungan Universitas Tanjungpura Pontianak termasuk lokasi yang tidak disebutkan dalam Paragraf 8 pasal 30 (Peraturan Daerah Kota Kota Pontianak Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak tahun 2013-2033), maka dari itu pada kenyataannya di lingkungan Universitas Tanjungpura masih terdapat banyak sekali pedagang kaki lima dan mengalami peningkatan drastis.

Lingkungan Universitas Tanjungpura merupakan tempat yang strategis yang dapat dipenuhi oleh pedagang kaki lima. Karena selain lokasinya dekat dengan kampus juga dekat dengan kos-an dimana tempat mahasiswa tinggal. Jalan Daya Nasional merupakan jalan perhubungan antara jalan Ahmad Yani dan jalan Imam Bonjol sehingga jalan tersebut ramai dilalui oleh pengguna jalan. Para pedagang kaki lima ini mengambil peluang untuk berjualan disepanjang jalan Daya Nasional karena kemungkinan untuk mendapatkan konsumen sangat besar baik itu dari mahasiswa maupun pengendara yang menggunakan jalan tersebut. Sehingga dapat dikatakan pertumbuhan pedagang kaki lima di lingkungan Universitas Tanjungpura tepatnya di Jalan Daya Nasional cukup tinggi dan terus bertambah disetiap tahunnya. Sebagian besar pedagang kaki lima yang berjualan di lingkungan Universitas Tanjungpura

menjual berbagai jenis makanan dan minuman siap saji.

Pedagang kaki lima juga berada tepat di depan kampus-kampus yang ada di lingkungan Universitas Tanjungpura. Sehingga membuat lingkungan kampus menjadi kurang tertata dengan baik yang mengakibatkan kurang nyaman untuk dipandang.

Berdasarkan hasil observasi 2020 keberadaan pedagang kaki lima di sekitar Universitas Tanjungpura tepatnya di Jalan Daya Nasional, diketahui sekitar 42 pedagang berjualan pada siang dan 20 pedagang yang berjualan pada malam hari. Sebanyak 25 melakukan aktivitas dengan menggunakan gerobak, sebanyak 7 pedagang menggunakan sepeda motor dan 3 menggunakan mobil jenis pickup, 7 pedagang menggunakan meja panjang untuk aktivitas dagangannya, dan dari semua pedagang tersebut menjual berbagai jenis makanan dan minuman siap saji, sebagian besar pedagang melakukan aktivitas tepat di atas trotoar atau di pinggir jalan dan kendaraan konsumen yang membeli dagangannya terparkir tepat di bahu jalan raya yang bisa menyebabkan bahaya bagi pengendara yang melalui jalan tersebut maupun bagi pedagang yang berjualan.

Berdasarkan fenomena yang terjadi tersebut, maka peneliti bermaksud untuk menganalisis bagaimana strategi Pemerintah Kota dalam menangani keberadaan pedagang kaki lima di kota Pontianak yang semakin lama semakin meningkat. Penelitian ini berfokus pada kebijakan pemerintah mengenai pelarangan berjualan di sepanjang Jalan Daya Nasional (Komplek Untan) Kota Pontianak, yang merupakan "lahan subur" bagi perkembangan kegiatan Pedagang Kaki Lima. Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu: 1.) Mendeskripsikan strategi Pemerintah Kota Pontianak dalam menangani keberadaan pedagang kaki lima di sepanjang Jalan Daya Nasional, 2.)

Mengemukakan respon masyarakat tentang pelanggaran berjualan di jalan Daya Nasional, 3.) Mengungkapkan harapan masyarakat atau pedagang kaki lima di Jalan Daya Nasional untuk kedepannya.

Kajian Literatur Sektor Informal

Menurut Ahmad (2002:73) sektor informal di sebut sebagai kegiatan ekonomi yang bersifat marjinal (kecil-kecilan) yang memperoleh beberapa ciri seperti kegiatan yang tidak teratur, tidak di sentuh peraturan, bermodal kecil dan bersifat harian, tetapi tidak tetap berdiri sendiri, berlaku di kalangan masyarakat yang berpenghasilan rendah, tidak membutuhkan keahlian dan keterampilan khusus, lingkungan kecil atau keluarga serta tidak mengenal perbankan, pembukuan maupun perkreditan.

Sektor informal bukan sekedar karena kurangnya lapangan pekerjaan, apalagi menampung lapangan kerja yang terbuang dari sektor informal akan tetapi sektor informal adalah sebagai pilar bagi keseluruhan ekonomi sektor formal yang terbukti tidak efisien (Swasono, 2007:81). Effendi mengatakan (Istilah sektor informal semakin populer setelah International Labour Organization (ILO) melakukan penelitian di korea penelitian di Keya dan kemudian melanjutkan penelitiannya tersebut ke Negara-negara berkembang lainnya. Pada penelitian tersebut istilah sektor informal di pergunakan sebagai pendekatan untuk membedakan tenaga kerja yang tergolong dalam dua kelompok yang berkaitan sifatnya (Saputra, 2018:10).

Mengenai sektor informal di Indonesia, menurut Widodo (dalam Almutahar, 2020: 77) dari segi karakteristiknya sektor informal mempunyai ciri-ciri sebagai berikut, yaitu:

a. Kegiatan usahanya tidak terorganisir secara baik, karena timbulnya unit usaha tidak menggunakan fasilitas atau

kelembagaan yang tersedia di sektor formal.

- b. Pada umumnya tidak mempunyai izin.
- c. Pola kegiatan tidak teratur, baik dalam arti lokasi maupun jam kerja.
- d. Kebijakan Pemerintah untuk membantu golongan ekonomi lemah tidak sampai ke sektor ini.
- e. Satuan usaha mudah keluar dan masuk dari sub sektor yang satu ke sub sektor yang lainnya.
- f. Teknologi yang di pakai masih bersifat sangat sederhana.
- g. Modal dan perputaran usaha relatif kecil sehingga skala operasinya juga kecil.
- h. Untuk menjalankan usaha tidak memerlukan pendidikan formal karena pendidikan diperoleh dari pengalaman sambil bekerja.
- i. Satuan usaha termasuk dalam golongan *one man enterprises* dan kalau mempekerjaan buruh biasanya berasal dari keluarga.
- j. Sumber dan modal usaha pada umumnya berasal dari tabungan sendiri atau dari lembaga keuangan yang tidak resmi.
- k. Hasil produksi atas jasa tertentu dikonsumsi oleh golongan masyarakat kota/desa yang berpenghasilan rendah dan kadang-kadang juga yang berpenghasilan menengah.

Bromley mengatakan, di antaranya berbagai usaha sektor informal adalah usaha PKL, tampaknya merupakan jenis pekerjaan penting dan relatif khas dalam sektor informal di kota. Kekhususan tersebut di karenakan usaha ini relatif paling mudah dimasuki serta berhadapan langsung dengan kebijaksanaan perkotaan (Saputra, 2018:13).

Pedagang Kaki lima

Istilah kaki lima berasal dari masa penjajahan Kolonial Belanda. Peraturan Pemerintahan Belanda pada waktu itu menetapkan bahwa setiap jalan raya yang

dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk pejalan kaki. Lebar luas pejalan adalah 5 kaki atau sekitar 1,5 meter. Ada juga yang mengatakan bahwa asal mula kata pedagang kaki lima adalah berasal dari bahasa Inggris “feet” yang artinya kaki, dan ukuran 1 feet adalah sekitar 21 cm. dulu, lebar trotoar adalah 5 feet (sekitar 1,5 m). Selanjutnya pedagang yang berjualan disepanjang trotoar disebut pedagang kaki lima (Almutahar, 2020: 79).

Orang yang berdagang disebut pedagang. Ada berbagai jenis pedagang. Pedagang besar (grosir), kecil, dan ada juga istilah pedagang kaki lima sering kali disingkat pedagang kaki lima atau dengan sebutan dengan kaki lima. Pedagang kaki lima adalah pedagang kecil yang menggunakan modal kecil dan berdagang tanpa tempat yang tetap atau permanen. Jika kita membuka Kamus Umum Bahasa Indonesia yang di susun oleh W.J.S Poerwadarminta, makna istilah kaki lima itu mempunyai arti: “lantai (tangga) di muka pintu atau di tepi jalan” dan “lantai di beri atap sebagai penghubung rumah dengan rumah” (Permadi, 2007:4).

Pedagang Kaki Lima merupakan sebuah potensi peluang usaha yang cukup menjanjikan terbukti dapat menggerakkan ekonomi riil masyarakat ditengah kondisi sulitnya mencari lapangan kerja dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Permebedayaan pedagang kaki lima yang dilakukan pemerintah belum optimal karena peraturan daerah tentang pemberdayaan pedagang kaki lima belum dapat diterapkan secara maksimal akibatnya masih ada kebijakan pemerintah yang dinilai masih tidak berpihak kepada pedagang kaki lima. Konsep pemberdayaan yang akan diterapkan kepada pedagang kaki lima belum mempunyai “sense of crisis” dan belum mempunyai bentuk ideal yang diterapkan dilapangan (Sarjono, dkk. 2014:1).

Penyebab Keberadaan Pedagang Kaki Lima

*Tahir NIM. E1021141079
Program Studi Pembangunan Sosial Fisip Untan*

Penyebab keberadaan pedagang kaki lima adalah dikarenakan tingginya angka pengangguran sehingga berdampak pada kemiskinan dan ketimpangan penduduk di perkotaan meningkat. Maka salah satu cara pemecahan masalah untuk memenuhi kebutuhan yang mudah dimasuki kalangan masyarakat menengah ke bawah adalah dengan melalui pengembangan dan penciptaan lapangan pekerjaan seperti pedagang kaki lima. Wirahadikusumah mengemukakan sektor informal (pedagang kaki lima) menjadi pilihan alternatif, karena mudah memasukinya, tidak perlu keterampilan khusus, serta pasar yang kompetitif (seperti definisi sektor informal oleh ILO), sehingga hal ini dapat menekan angka pengangguran dan kemiskinan. Sektor infomal terus berkembang dalam menyerap tenaga kerja yang tidak tertampung dalam sektor formal (Parid, 2003: 29).

Selain itu keberadaan (sektor Informal) pedagang kaki lima juga menguntungkan bagi konsumen dari kalangan masyarakat ekonomi menengah ke bawah, karena pedagang kaki lima mampu menyediakan barang-barang kebutuhan dengan harga yang relatif lebih murah.

Dampak Keberadaan Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima dianggap mengganggu para pengguna jalan karena pedagang telah memakan ruas jalan dalam mengelarkan dagangannya. Hal ini terjadi karena pedagang kaki lima sering menggunakan ruang publik, yang seharusnya bukan untuk berjualan tetapi digunakan untuk melakukan aktivitas perdagangan. Para pengguna jalan juga dirugikan dengan menyempitnya ruas jalan, sehingga lalu lintas menjadi terhambat karena tidak leluasa bergerak dan pada akhirnya kemacetan tidak dapat dihindari (Purnomo, R. A, 2016).

Kebijakan Sosial

Pengertian Kebijakan Sosial

Kebijakan sosial adalah seperangkat tindakan, kerangka kerja, petunjuk, rencana, peta atau strategi, yang di rancang untuk menterjemahkan visi politis pemerintah atau lembaga pemerintah ke dalam program dan tindakan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang kesejahteraan sosial (Suharto, 2012: 82).

Kebijakan sosial adalah salah satu bentuk dari kebijakan publik kebijakan sosial merupakan ketetapan pemerintah yang di buat untuk merespon isu-isu yang bersifat publik, yakni mengatasi masalah sosial atau memenuhi kebutuhan masyarakat banyak. Menurut Dalton dan Smith, secara singkat kebijakan sosial menunjuk pada apa yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pemberian beragam tunjangan pendapatan, pelayanan kemasyarakatan dan program-program tunjangan sosial lainnya (Suharto, 2013:10-11).

Kebijakan sosial sebagai sebuah kebijakan publik, kebijakan sosial memiliki fungsi preventif (pencegahan), kuratif (penyembuhan), dan pengembangan (developmental). Kebijakan sosial adalah ketetapan yang di desain secara kolektif untuk mencegah terjadinya masalah sosial (fungsi preventif), mengatasi masalah sosial (fungsi kuratif) dan mempromosikan kesejahteraan (fungsi pengembangan) sebagai wujud kewajiban negara (state obligation) dalam memenuhi hak-hak sosialnya (Suharto, 2013: 11).

Tujuan Kebijakan Sosial

Suharto (2012: 62) mengungkapkan secara rinci tujuan kebijakan sosial adalah sebagai berikut:

- a. Mengantisipasi, mengurangi, atau mengatasi masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat.
- b. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu, keluarga kelompok, atau masyarakat yang tidak dapat mereka

penuhi secara sendiri-sendiri melainkan harus melalui tindakan kolektif.

- c. Meningkatkan hubungan intrasosial manusia dengan mengurangi kedisfungsian sosial individu atau kelompok yang disebabkan oleh faktor-faktor internal-personal maupun eksternal-struktural.
- d. Meningkatkan situasi dan lingkungan sosial-ekonomi yang kondusif bagi upaya pelaksanaan peranan-peranan sosial dan pencapaian kebutuhan masyarakat sesuai dengan hak, harkat dan martabat kemanusiaan.
- e. Menggali, mengalokasikan dan mengembangkan sumbe-sumber kemasyarakatan demi tercapainya kesejahteraan sosial dan keadilan sosial.

Teori

Analisis Kebijakan Sosial

Dunn mengatakan (Suharto, 2012: 84), analisis kebijakan sosial adalah ilmu terapan yang menggunakan berbagai metode penelitian dan argumentasi untuk menghasilkan informasi yang relevan dalam menganalisis masalah-masalah sosial yang mungkin timbul akibat diterapkannya suatu kebijakan. Ruang lingkup dan metoda analisis kebijakan umumnya bersifat deskriptif dan faktual mengenai sebab-sebab dan akibat-akibat suatu kebijakan.

Ada tiga bentuk atau model analisis kebijakan, yaitu model prospektif, model retrospektif dan model integratif, yaitu sebagai berikut:

- a. Model prospektif adalah bentuk analisis kebijakan yang mengarahkan kajiannya pada konsekuensi-konsekuensi kebijakan 'sebelum' suatu kebijakan diterapkan. Model ini dapat disebut sebagai model prediktif, karena sering kali melibatkan teknik-teknik peramalan (forecasting) untuk memprediksi kemungkinan-kemungkinan yang akan timbul dari suatu kebijakan yang akan diusulkan.

- b. Model retrospektif adalah analisis kebijakan yang dilakukan terhadap akibat-akibat kebijakan 'setelah' suatu kebijakan diimplementasikan. Model ini biasanya disebut sebagai model evaluatif, karena banyak melibatkan pendekatan evaluasi terhadap dampak-dampak kebijakan yang sedang atau telah diterapkan.
- c. Model integratif adalah model perpaduan antara kedua model prospektif dengan model retrospektif. Model ini kerap disebut sebagai model komprehensif atau model holistik, karena analisis dilakukan terhadap konsekuensi-konsekuensi kebijakan yang mungkin timbul, baik 'sebelum' maupun 'sesudah' suatu kebijakan dioperasikan.

Pentingnya Analisis Kebijakan Sosial

Analisis kebijakan sosial sangat penting untuk menentukan suatu kebijakan tersebut memiliki dampak positif atau dampak negatif terhadap masyarakat, apakah kebijakan tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan apakah kebijakan tersebut mampu merespon masalah-masalah sosial yang dirasakan oleh masyarakat.

Dengan menggunakan pendekatan proses (kebijakan publik) Anderson dan Dye (Kismartini.2019: 20) menjelaskan alasan mengapa analisis kebijakan publik itu penting dalam tiga kategori berikut:

- a. Alasan ilmiah, Melihat dari sudut pandang ilmiah analisis kebijakan publik dipelajari dengan maksud untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai hakikat bagaimana pola dan proses analisis kebijakan publik. Analisis kebijakan publik akan menghasilkan kebijakan itu berhasil sesuai kaidah ilmiah yang sistematis.
- b. Alasan professional, Melihat dari sudut profesional maka analisis kebijakan publik dimaksudkan untuk membantu policy maker memecahkan masalah-masalah publik dalam kehidupan

sehari-hari. Analisis kebijakan publik penting juga karena untuk meminimalisasi gagalnya sebuah kebijakan atau memberikan alternatif lain ketika kebijakan publik tertentu menemui jalan buntu.

- c. Alasan Politik, Analisis kebijakan publik diharapkan akan memperoleh sebuah kebijakan publik yang bermanfaat bagi masyarakat, dan menghindari kegagalan dalam implementasi kebijakan. Tujuan utama adanya kebijakan publik adalah untuk mengatasi masalah-masalah publik. Dengan begitu tujuan secara politis yang dilakukan oleh pemerintah bisa terpenuhi. Alasan politis dari analisis kebijakan publik juga berbeda dengan nasehat kebijakan atau rekomendasi kebijakan. Analisis kebijakan publik pada umumnya bersangkutan dengan penelitian dan penggambaran secara cermat mengenai sebab-sebab dan akibat yang ditimbulkan dari sebuah kebijakan publik. Seperti contoh: Beberapa tahun lalu pemerintah memberlakukan kebijakan *tax amnesty*. Sebelum diimplementasikan ke masyarakat kebijakan *tax amnesty* akan dibanalisis bagaimana implikasinya di masyarakat. Sebelum itu kebijakan *tax amnesty* diambil oleh pemerintah adalah untuk meningkatkan pendapatan pemerintah dalam bidang pajak. Selain itu juga membawa uang warga Indonesia yang selama ini disimpan di lembaga keuangan luar negeri.

Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan referensi dan perbandingan, penulis akan mengemukakan penelitian terdahulu yang topiknya berkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Adapun referensi yang ditulis adalah sebagai berikut:

Wati (2013) telah melakukan penelitian tentang Analisis Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru Untuk Pengembangan dan Penataan Pasar

Tradisional (study Kasus Pada Pasar Pagi Arengka Pekanbaru). Dalam penelitiannya Wati merumuskan 2 masalah yaitu: (1) Apakah kebijakan Pemerintah Daerah untuk pengembangan dan penataan Pasar Pagi Arengka Pekanbaru sudah efektif?, (2) faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi upaya Pemerintah Daerah dalam pengembangan dan penataan Pasar Pagi Arengka Pekanbaru?.

Adapun kesimpulan dalam penelitian yang dilakukan oleh Lina Wati terdapat 2 hal dalam Analisis Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru Untuk Pengembangan dan Penataan Pasar Tradisional, sebagai berikut:

1. Hasil rekapitulasi jawaban responden menunjukkan bahwa kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru untuk Pengembangan dan Penataan Pasar Tradisional dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden setuju dengan kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru untuk Pengembangan dan Penataan Pasar Tradisional namun harus dibarengi dengan beberapa syarat seperti pemberian fasilitas dan sarana-prasarana lain dalam berdagang.
2. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru untuk Pengembangan dan Penataan Pasar tradisional adalah dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Penelitian yang dilakukan Wati memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu Analisis Kebijakan Sosial Tentang Keberadaan Pedagang Kaki Lima di Jalan Daya Nasional (Komplek Untan) Kota Pontianak. Kesamaan penelitiannya adalah sama-sama mengupas tentang Kebijakan Pemerintah.

Selain kesamaan, penelitian yang akan dilakukan juga memiliki perbedaan. Perbedaannya adalah dalam Penelitian Wati Analisis Kebijakan Pemerintah diarahkan pada Pengembangan dan

Penataan Pasar Tradisional Kota Pekanbaru, sedangkan dalam penelitian ini Analisis Kebijakan diarahkan ke Kebijakan Sosial Tentang Keberadaan Pedagang Kaki Lima di Jalan Daya Nasional (Komplek Untan) Kota Pontianak.

B. Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik observasi dan wawancara. Dimana Observasi adalah pengamatan terhadap gejala yang diteliti, dan peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan yang terkait dalam tema penelitian.

Dalam penelitian ini penulis berusaha mengumpulkan data selengkap-lengkapnyanya secara menyeluruh dan integral untuk dapat memberikan gambaran secara jelas dari keberadaan aktivitas pedagang kaki lima terkait dengan Kebijakan Pemerintah tentang pelarangan keberadaan pedagang kaki lima tersebut, Yakni mengungkapkan lebih mendalam mengenai Kebijakan dan pendapat masyarakat terhadap kebijakan pemerintah tentang pelarangan keberadaan pedagang kaki lima di Jalan Daya Nasional (Komplek Untan) Kota Pontianak.

Menurut Bogdan dan Taylor (Moleong 2000: 3), "metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati". Sehingga dapat diambil kesimpulan, metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan makna dari obyek yang menjadi pengamatan dan lebih memusatkan pada kualitas data tersebut.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling utama dalam penelitian karena bertujuan untuk mendapatkan data, keterangan dan informasi sumber data yang diperoleh.

Dalam hal ini yang digunakan adalah observasi, Wawancara dan Dokumentasi untuk sumber data yang sama (Sugiyono, 2012: 83).

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

a. Observasi (pengamatan)

Teknik pengumpulan data melalui proses pengamatan secara langsung terhadap fenomena-fenomena yang menjadi obyek penelitian, dan mencatat segala gejala-gejala yang diperlukan di lapangan untuk dipelajari sebagai acuan yang berkenaan dengan topik penelitian.

b. Wawancara

Peneliti mewawancarai informan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dan wawancara dilakukan dengan wawancara secara mendalam.

c. Dokumentasi dan Study Pustaka

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan alat dokumentasi berupa kumpulan data bentuk tulisan dan foto sebagai penunjang peneliti untuk memperoleh data yang akurat dan valid, dan Study pustaka dilakukan dengan cara membaca, mencatat dan mempelajari beberapa Peraturan Daerah Kota Pontianak yang berhubungan dengan tema penelitian.

Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan melalui tiga tahapan atau alur yaitu; (1) reduksi (2) penyajian (3) penarikan kesimpulan. Pada tahap pertama, peneliti membaca, mengkaji dan menelusuri data yang telah dikumpulkan berdasarkan hasil wawancara. Pada tahap kedua, mencatat dan memilih data yang dikumpulkan sesuai dengan tema yang diangkat. Tahap ketiga, mengambil kesimpulan dari penyajian data yang dilakukan pada tahap sebelumnya.

Validitas Data

Untuk menguji keabsahan data yang terkumpul peneliti menggunakan teknik triangulasi yaitu dengan cara menguji data melalui beberapa sumber dan metode, Triangulasi teori dilakukan dengan melakukan kajian ulang setelah penelitian. Validitas data diperlukan dalam penelitian dengan maksud sebagai pembuktian dan penguatan, bahwa data yang diperoleh peneliti sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Patton (dalam Moleong, 2000:178) menyatakan sebagai berikut: a) Pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data, b) Pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

C. Pembahasan

1. Strategi Pemerintah Kota Pontianak dalam menangani masalah keberadaan pedagang kaki lima di Jalan Daya Nasional.

Keberadaan Pedagang Kaki Lima di Kota Pontianak sudah menjadi satu masalah klasik yang dihadapi oleh Pemerintah Kota secara terus menerus. Dari segi ekonomi tentunya jelas dapat dilihat bahwa dengan adanya pedagang kaki lima dapat diserap tenaga kerja yang dapat membantu pekerja tersebut dalam mendapatkan penghasilan.

Dari segi sosial dapat dilihat jika kita rasakan bahwa keberadaan pedagang kaki lima dapat menghidupkan maupun meramaikan suasana. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri, selain itu dalam segi budaya kota, pedagang kaki lima membantu suatu kota dalam menciptakan budayanya sendiri. Namun, di sisi lain keberadaan pedagang kaki lima karena kegiatan usahanya berada pada lokasi-lokasi yang bukan tempatnya, seperti trotoar, taman lapangan, halaman rumah, di atas parit dan lain-lain sehingga menimbulkan masalah-masalah ketertiban,

kebersihan, keindahan, kesehatan, serta keamanan kota.

Pedagang kaki lima keberadaannya memang selalu dipermasalahkan oleh pemerintah kota karena ada beberapa alasan, yaitu diantaranya:

- a. Penggunaan ruang publik oleh pedagang kaki lima bukan untuk fungsi semestinya karena dapat membahayakan orang lain maupun pedagang itu sendiri.
- b. Pedagang kaki lima membuat tata ruang kota menjadi tidak indah di pandang.
- c. Keberadaan pedagang kaki lima tidak sesuai dengan visi kota yaitu yang sebagian besar menekankan aspek kebersihan, keindahan dan kerapihan kota.
- d. Pencemaran lingkungan yang sering dilakukan oleh para pedagang.

Bagaimanapun juga pedagang kaki lima adalah warga negara yang harus dilindungi hak-haknya, hak untuk hidup, bebas berkarya, berserikat dan berkumpul. Seperti tercantum dalam UUD 45 Pasal 27 ayat (2): "Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan", dan Pasal 13 UU nomor 09/1995 Tentang Usaha Kecil, "Pemerintah menumbuhkan iklim usaha dalam aspek perlindungan, dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan untuk: a) Menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, dan lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima, serta lokasi lainnya, b) Memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan".

Fenomena pedagang kaki lima dan masalah-masalah yang ditimbulkan pedagang kaki lima seperti yang telah diuraikan di atas, dianggap menyulitkan dan menghambat pemerintah untuk mewujudkan sebuah kota yang bersih dan tertib salah satunya, walaupun pemerintah

telah membuat kebijakan Perda untuk melarang keberadaan pedagang kaki lima, namun faktanya jumlah pedagang kaki lima malah semakin banyak. Dan tentu kebijakan Perda tersebut memenuhi banyak kontra dari para PKL karena kebijakan pemerintah itu dianggap tidak tepat, tidak adil dan merugikan para pedagang kaki lima.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Dinas terkait mengenai kebijakan Pemerintah Kota Pontianak tentang keberadaan pedagang kaki lima di lingkungan Universitas Tanjungpura (Komplek Untan), diketahui bahwa peraturan resmi atau secara tertulis dari pemerintah untuk pelarangan keberadaan pedagang kaki lima di Jalan Daya Nasional (Komplek Untan) memang belum ada.

Bapak Wagianto mengungkapkan (pada wawancara 24 Juni 2021):

"Kita dari dinas turun langsung ke lapangan mengecek, mendata perwilayah setiap kecamatan dan mengatur para pedagang kaki lima yang ada di Kota Pontianak, bukan hanya di pasar-pasar, di taman-taman, dan di pinggir jalan kita data. Termasuk pedagang pakaian bekas seperti lelong. Dulu yang pernah kita lakukan di Jalan Daya Nasional itu hanya sejenis pakaian saja, kalo para pedagang-pedagang gerobak makanan dan jajanan lain di Jalan Daya Nasional ndak ada atau belum pernah kita lakukan secara langsung."

Dari penjelasan tersebut maka dapat diketahui bahwa kalau pendataan khusus untuk pedagang kaki lima yang di Jalan Daya Nasional (Komplek Untan) memang belum ada. Akan tetapi dapat kita lihat bahwa perkembangan pedagang kaki lima di Jalan Daya Nasional sangat pesat. Lalu bagaimana peraturaturannya dari Pemerintah Kota?.

Bapak Wagianto mengatakan (pada wawancara 24 Juni 2021):

"Kalau masalah peraturan atau perda Kota Pontianak, kita mengacu pada

peraturan menteri dalam negeri no.41 tentang pemberdayaan pedagang kaki lima, berdasarkan turunan dari peraturan menteri dalam negeri maka pemerintah kota mengeluarkan perda no. 11 tahun 2019 tentang ketertiban umum, jadi belum ada peraturan secara khusus yang kita lakukan untuk jalan Daya Nasional.”

Sesuai pernyataan di atas maka dapat dilihat dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak No. 11 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum. Pasal 17 Ayat (1) poin (c) “Setiap orang atau badan dilarang mendirikan bangunan, kios, tenda, atau sejenisnya di atas trotoar, sungai, parit, saluran pembuangan air, di pinggir jalan dan/atau di atas badan jalan, di atas tanah fasilitas sosial (fasos) atau fasilitas umum (fasum) untuk berjualan/berdagang atau keperluan lainnya kecuali mendapat izin dari Pemerintah Daerah”. Poin (d) “Setiap orang atau badan dilarang meletakkan, menumpuk dan/atau meninggalkan gerobak, tenda, peti, keranjang dan/atau benda/barang lainnya di atas trotoar, dipinggir jalan dan/atau badan jalan umum, di fasum/fasos untuk berjualan/berdagang atau keperluan lainnya kecuali mendapat izin dari Pemerintah Daerah”.

Selanjutnya mengenai masalah penertiban para pedagang kaki lima yang ada di Kota Pontianak biasanya Pemerintah Kota menugaskan langsung kepada Satpol PP untuk langsung menindak dan menertibkan para pedagang yang tidak taat aturan. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari salah satu staf di Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak yaitu:

“kalo penertiban dan pemberdayaan kita melimpahkan pada pihak Disperindag dan Satpol PP sendiri, karena Disperindag sendiri memiliki fungsi pembinaan dan pemberdayaan, sedangkan Satpol PP berfungsi sebagai satuan yang langsung ditugaskan kelapangan untuk melakukan

penertiban, untuk pembinaan itu kita tempatkan di lingkungan pasar yang kita atur jarak dan jumlahnya supaya mereka tidak mengganggu aktifitas pasar, dan kita relokasikan ke tempat-tempat yang di anggap pemerintah kota tidak mengganggu ketertiban umum, bisa diambil sebagai contoh di taman akcaya, di jalan Tanjungpura komplek barito, dan di tempat-tempat lainnya yang di izinkan oleh pemerintah” (Hasil wawancara 24 Juni 2021).

Berdasarkan keterangan tersebut di atas bahwa penertiban pedagang kaki lima Kota Pontianak di lakukan sesuai Peraturan Walikota. Namun penertiban para pedagang kaki lima di wilayah Kota Pontianak saat ini belum terlaksana dengan maksimal dan merata, karena adanya satu masalah lain yang selalu muncul dalam setiap pemecahan masalah yaitu disatu sisi penegakan hukum dan sisi kebutuhan perut yang tidak dapat diselesaikan secara gegabah karena dapat memicu timbulnya konflik sosial yang lainnya.

Penertiban pedagang kaki lima yang ada di Kota Pontianak dapat dikatakan belum optimal. Karena upaya yang dilakukan selalu berbenturan kepentingan antara Pemerintah Daerah untuk menciptakan tatanan kota yang indah, sehat dan aman, maupun pihak pedagang kaki lima sendiri untuk dapat berjualan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Meskipun telah cukup. Banyak diakui bahwa pedagang kaki lima memiliki potensi dalam menciptakan lapangan kerja dan kesempatan memperoleh penghasilan, namun masih belum ada pemecahan yang rasional terhadap kepentingan yang bertentangan antara pemeliharaan kota yang bersih dan indah dengan perkembangan jumlah pedagang kaki lima. Walaupun saat ini Pemerintah Daerah secara relatif telah menerima kehadiran pedagang kaki lima dengan berbagai program yang digunakan namun keberadaan pedagang kaki lima di Kota

Pontianak tetaplah harus mematuhi segala aturan yang ada dan setiap perubahan kebijakan yang berlaku.

Mengenai penertiban pedagang kaki lima menurut keterangan dari Bapak Wagianto menyebutkan:

“kalau mengenai sosialisasi dari dinas sendiri, tentang aturan pedagang kaki lima yang disampaikan terkait masalah jam usaha atau operasional dan jumlah pedagang yang di batasi harus sesuai peraturan itu adalah peraturan secara umumnya untuk seluruh pedagang kaki lima di kota Pontianak, di pasar-pasar, di taman-taman lainnya dan termasuk yang di pinggir-pinggir jalan, untuk yang di Jalan Daya Nasional kita memang belum ada membuat peraturan seperti itu kita hanya dalam bentuk himbauan dan penertiban saja” (Hasil wawancara 24 Juni 2021)

Selanjutnya hasil wawancara dengan salah satu staf Kelurahan Bansir Laut Ibu Asiyah mengatakan bahwa, keberadaan pedagang pedagang kaki lima di Jalan Daya Nasional memang sudah ada sejak dahulu sejak berjalannya perkembangan pembangunan Universitas Tanjungpura. Dari kelurahan juga dari dahulu tidak ada mengeluarkan peraturan-peraturan tentu tentang berjualan di jalan tersebut.

“kami dari kelurahan memang tidak ada mengeluarkan peraturan-peraturan tertentu untuk mengatur para pedagang ini, mereka datang dari berbagai daerah dan berjualan di daerah tersebut dengan kesadaran mereka sendiri, memang Jalan Daya Nasional itu termasuk daerah yang berada di Kelurahan Bansir Laut tapi batas kebijakan kami belum mengatur hal-hal tersebut, jadi dari pihak kelurahan memang belum mengatur tentang pedagang kaki lima kami hanya mendata kependudukan saja, selama pedagang kaki lima itu tidak terlalu di anggap mengganggu masyarakat bagi kami ya sah-sah saja pedagang berjualan di

daerah itu ya kan, bahkan itu bagus bagi ekonomi masyarakat dapat menambah penghasilan mereka dan berbagai kebutuhan juga mudah didapat oleh penduduk setempat”. (Hasil Wawancara 28 Juni 2021)

Berdasarkan keterangan di atas menggambarkan bahwa aturan tentang keberadaan pedagang kaki lima di Kota Pontianak sudah jelas diatur dalam peraturan Walikota melalui sosialisasi dan penertiban yang dilakukan oleh dinas-dinas terkait kepada para pedagang kaki lima. Namun peraturan dari Pemerintah Kota untuk pedagang kaki lima di Jalan Daya Nasional belum tercipta secara khusus. Akan tetapi Pemerintah telah menetapkan Peraturan Daerah No. 11 2019 Tahun Tentang Ketertiban Umum yang harus di patuhi oleh seluruh pedagang kaki lima di Kota Pontianak.

2. Respon masyarakat tentang pelanggaran berjualan di jalan Daya Nasional.

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari wawancara kepada masyarakat atau pedagang kaki lima yang ada di Jalan Daya Nasional (Komplek Untan) menyatakan pendapat mereka, diantaranya ada masyarakat yang beranggapan bahwa keberadaan pedagang kaki lima di perkotaan bisa kita katakan tidak teratur, umumnya mereka tidak tertib dan jorok karena mereka berjualan di trotoar jalan, di taman-taman kota, di jembatan penyebrangan, bahkan dibadan jalan, sehingga menjadi penyebab kemacetan lalu lintas ataupun merusak keindahan kota, dan ada juga masyarakat yang setuju dengan adanya peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Kota namun tidak menutup kenyataan dengan berbagai kebutuhan sosial ekonomi yang Pemerintah juga diharapkan mampu mengatasi masalah yang dihadapi oleh para pedagang.

Selanjutnya mengenai keberadaan pedagang kaki lima di Jalan Daya Nasional

menurut keterangan dari masyarakat atau pedagang yang ada di lokasi menyatakan bahwa, mereka datang dan mangkal berjualan di sepanjang jalan tersebut dengan kesadaran sendiri yang melihat adanya peluang keramaian dan merupakan lokasi yang strategis menurut mereka untuk berjualan. Rata-rata setelah diwawancarai para pedagang juga menyatakan hal yang sama, bahwa untuk berjualan di lokasi tersebut memang belum adanya pelarangan atau aturan khusus dari Pemerintah Kota Pontianak yang mengatur dan melarang pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang Jalan Daya Nasional.

Pemerintah Kota telah mengeluarkan Peraturan Daerah mengenai dilarang berjualan di pinggir-pinggir jalan di atas parit dan di atas trotoar seperti yang dikatakan dalam Peraturan Daerah no. 11 tahun 2019 tentang ketertiban umum. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang di sampaikan oleh Bapak Mail (pedagang kaki lima) yaitu:

“saya di sini sudah berjualan selama sepuluh tahun, saya memilih jualan di sini karena sini ramai, saya berjualan di sini tidak ada peraturan secara tertulis, saya datang dan langsung berjualan, saya tahu tentang aturan pemerintah tidak boleh berjualan di pinggir jalan karena nanti bias mengakibatkan kemacetan dan segala macamnya gitu, ya tapi mau bagaimana lagi saya juga butuh makan dan menafkahi anak istri saya mau tidak mau saya harus tetap berjualan walau apapun risikonya kan gitu. Dulu sesekali pernah ada penertiban dari satpol pp tapi hanya beberapa kali gitu, sekarang tidak pernah ada lagi, mereka mengatakan kalau kita hanya boleh berjualan di jam-jam tertentu pada bukan jam kerja seperti itu, ya yang namanya pedagang ya kita setelah di tertibkan ya datang lagi”

(Hasil wawancara pada 25 Juni 2021)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut Bapak Mail yang sudah berjualan selama sepuluh tahun di Jalan Daya Nasional telah mengetahui tentang aturan Pemerintah Kota tentang dilarangnya berjualan di badan jalan dan segala peringatan lainnya, akan tetapi dengan adanya kebutuhan ekonomi, Bapak Mail tidak dapat berbuat banyak. Bagaimanapun Bapak Mail harus berjualan untuk mencari nafkah.

Konsumen yang bernama Kamis merupakan salah Satu mahasiswa Untan juga memberikan tanggapan mengenai penertiban pedagang kaki lima di Jalan Daya Nasional:

“saya tahu menurut saya, penertiban yang di lakukan oleh Pemerintah memang ada pro kontranya, bagi pedagang karena ada tuntutan keuangan untuk keluarga namun di di lain juga tidak bagus untuk keindahan kota”

(Hasil wawancara pada 30 Juni 2021)

Selanjutnya bapak Bapak Nizar 34 tahun yang sebagai masyarakat biasa yang bekerja sebagai karyawan swasta mempunyai tanggapan keberadaan pedagang kaki lima di Jalan Daya Nasional (Komplek Untan) sangatlah menguntungkan baginya karena Ia adalah pelanggan utama yang membeli jajanan di jalan tersebut, karena Nizar merupakan salah satu masyarakat yang bertempat tinggal di daerah tersebut.

Nizar juga mengatakan bahwa Pemerintah tidak perlu melarang pedagang berjualan di area Jalan Daya Nasional. Berikut tanggapan Nizar terhadap pelarangan bejualan di Jalan Daya Nasional:

“saye rase ndak perlu lah pemerintah tu melarang pedagang berjualan di sini, karena saye pingin belanja di sini dekat dengan rumah saye, saye sering bawak anak saye jajan di sini, dahlah tempat ndak jaoh, hargenye pun lumayan murah

gak sini ni, dan banyak pulak tu makan minom yang dapat saye beli di sini, kan mudah ndak pelu agik nak pegi jaoh-jaoh, jadi untok pemerintah lah ye saye mohon janganlah larang orang nak berdagang disini, di ator jak d mane tempat yang layaknye di sini ni, biar ndak jaoh-jaoh kami nak pegi belinye". (Hasil wawancara 30 Juni 2021)

Berdasarkan pendapat Bapak Nizar dapat di lihat bahwa keberadaan pedagang kaki lima di Jalan Daya Nasional merupakan hal yang baik baginya karena masyarakat bisa mendapatkan makanan dan minuman yang relatif murah dengan mudah. Muhammad yang merupakan pedagang pentol kuah juga menanggapi tentang larangan berjualan di sepanjang bahu Jalan Daya Nasional, sebagai berikut:

"sebenarnya saya sudah mengetahui bahwa telah ada larangan berjualan di badan Jalan Daya Nasional ini melalui pemberitahuan dan penertiban yang di lakukan oleh satpol pp, tapi saat adanya satpol pp aja saya pergi dari sini setelah mereka tidak ada ya saya kembali lagi, saat saya berjualan di sini memang belum ada izin nya Cuma kami di beritahu saja tidak boleh bejualan di sini"
(hasil wawancara pada 28 Juni 2021)

Bu Lastri sebagai pedagang minuman es yang sudah berjualan selama 4 tahun di Jalan Daya Nasional memiliki pandangan penertiban pedagang kaki lima yang di lakukan oleh Pemerintah sebagaimana di katakan kepada peneliti yaitu:

"saya tahu tentang larangan berjualan di sepanjang jalan ini tapi mau gimana lagi, saya harus tetap berjualan untuk mendapatkan uang, saya memandang penertiban yang di lakukan oleh pemerintah itu bagus untuk jalan hijau, tapi belum mengena kepada kami rakyat kecil ini, kami juga butuh penghasilan,

kalau di sini sebaiknya biarkan saja kami berjualan, saat ada penertiban saya hanya diam saja dan mengikuti selama tidak ada melakukan kekerasan dan masih ada toleransi, lalu besoknya saya kembali lagi berjualan". (Hasil wawancara 30 Juni 2021)

Selanjutnya Ibu Fatimah mengatakan bahwa mengetahui peraturan Pemerintah tentang dilarangnya berjualan di Jalan Daya Nasional, akan tetapi peraturan tersebut tidaklah jelas, Ia juga tidak tahu pasti seperti apa pasalnya, yang dia tahu hanya sebatas pemberitahuan saja, dan berjualan sudah selama 5 tahun di Jalan Daya Nasional ia tidak pernah mendapatkan teguran yang serius, maka dari itu, ia berjualan saja untuk menambah penghasilan demi memnuhi kebutuha, berikut tanggapan yang di sampaikan oleh Ibu Fatimah mengenai pelatangan berjualan di sepanjang Jalan Daya Nasional:

"ya saya tetap berjualan di sini karena saya sudah lama berjualan di sini sudah sekitar lima tahun dan belum pernah ada penertiban besar-besaran gitu yang betul melarang untuk jualan, saya jugak gak tahu lebih jelasnya pasal pelarangan itu seperti apa. Saya jualn di sini karena ramai, yang saya tahu bisa cari uang aja untuk menuhi kebutuhan saya". (Hasil wawancara 1 Juli 2021)

Dari ungkapan para pedagang kaki lima dan masyarakat di atas, dan menurut hasil pengamatan peneliti dapat di lihat bahwa para pedagang telah mengetahui tentang Peraturan Daerah yang disosilisasikan oleh pemerintah, namun masyarakat tidak ada pilihan selain melanggar aturan dan tetap berjualan di sepanjang Jalan Daya Nasional demi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.

3. Harapan Masyarakat Atau Pedagang Kaki Lima di Jalan Daya Nasional untuk Kedepannya

Pedagang kaki lima pada umumnya sudah terbiasa dengan kedatangan Satpol PP dan dengan berbagai macam pemberitahuan yang diberikan. Saat Satpol PP datang para pedagang akan menutup dagangan mereka dan bersiap-siap untuk pergi, akan tetapi saat petugas Satpol PP sudah tidak ada lagi di lokasi maka para pedagang akan kembali lagi untuk menggelar dagangan mereka. Hal ini terus-menerus berlangsung antara masyarakat dengan aparat pemerintah yaitu Satpol PP namun hal tersebut membuat masyarakat memiliki harapan sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara pada 1 Juli 2021 dengan salah satu pedagang yaitu Ibu Seri pedagang es buah mengatakan:

“kami pedagang ini untuk di Jalan Daya Nasional ini inginnnya bagaimana soslusi yang di berikan pemerintah itu harus saling menguntungkan antara kami dan perintah itu, jadi kami minta di lokasikan di daerah ini walaupun di situ harus ada bayaar sewa-nya itu ndak apa-apalah yang penting kami bisa berjualan”

Hal tersebut juga sama dengan harapan yang disampaikan oleh bapak Budiman sebagai pedagang es buah yang sudah berjualan selama 4 tahun di Komplek Untan, dan berdagang dari siang sampai malam hari jika cuaca sedang bagus, adapu yang dikatakana oleh Bapak Budiman sebagai berikut:

“saya harapan saya kedepannya untuk Pemerintah Kota saya harap pedagang yang ada di Jalan Daya Nasional ini jangan lah di larang berjualan, tapi tolong di beri lokasi yang benar untuk kami, walaupun ada retribusinya yang ditarik pemerintah, karena kami sangat butuh untuk berdagang di sini karena ramai, selama ini untuk yang begini belum

Tahir NIM. E1021141079

Program Studi Pembangunan Sosial Fisip Untan

pernah terwujud bagaimanapun cantiknya saya terserah pemerintah asalkan saya tetap bisa berdagang di sini”. (Hasil wawancara 1 Juli 2021)

Selanjutnya Ibu SR sebagai pedagang es buah juga menyatakan hal yang tidak jauh berbeda yaitu:

“saya sebagai pedagang hanya bisa berharap kepada pemerintah agar bersikap adil kepada kami, bukan hanya melarang saja kami untuk berjualan di dini tapi berikan kami tempat berjualan yang layak agar kami bisa mencari nafkah, kalopun kami harus bayar sewa tapi jangan mahal-mahal karena kami rakyat kecil” (Hasil wawancara pada 29 Juni 2021)

Bapak Budi pedagang pentol di depan Fakultas Kehutanan mengatakan, ia tidak bisa pergi dari lokasi bejualan tersebut karena di lokasi tersebut terdapat peluang yang menjanjikan, ramai adalah salah satu alasan baginya untuk tetap berjualan di sepanjang bahu Jalan Daya Nasional, berikut harapan Bapak Budi sebagai pedagang di Jalan Daya Nasional:

“saya akan tetap berjualan di sini meskipun ada larangan dari pemerintah, tetapi itu kan tidak setiap saat saya akan pergi jika ada penertiban saja, jika sudah tidak ada penertiban lagi, saya akan kembali, harapan saya untuk Pemerintah agar saya tetap bisa berjualan di sini kalau perizinan resmi tidak ada tapi saya haraplah secepatnya ada perizinan tersebut, gimanapun caranya saya harap pemerintah itu tidak terlalu menekan kami pedagang ni, karena di sini banyak mahasiswa yang mau beli dagangan itu merupakan usaha bagi saya untuk mencari uang, karena hanya ini mata pencaharian saya”. (Hasil wawancara 30 Juni 2021)

Kemudian Bang Nanak sebagai pedagang pentol bakar di samping Mesjid Muhtadin mengatakan:

"kami sebagai pedagang yang ada di Jalan ini sangat berharap kepada Pemerintah Kota agar kami tidak di larang untuk berjualan di sini karena saya yang berjualan di jalan ini mau membayarkan jika ada aturan biaya retribusi, kami ingin bise tetap berjualan di sini". (Hasil wawancara 1 Juli 2021)

Dari beberapa pernyataan pedagang di atas dapat diketahui bahwa diperlukannya suatu pengelolaan mengenai keberadaan pedagang kaki lima di Jalan Daya Nasional tersebut sehingga dampak yang dirasakan lebih banyak menguntungkan bagi pedagang kaki lima dan masyarakat maupun pemerintah.

C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian mengenai Analisis Kebijakan Sosial Pemerintah Kota Pontianak dan persepsi atau respon masyarakat terhadap pelarangan keberadaan pedagang kaki lima di Jalan Daya nasional (Komplek Untan) dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Pontianak telah mengeluarkan Peraturan Daerah No. 11 tahun 2019 Tentang ketertiban umum untuk mengendalikan perkembangan pedagang kaki lima di seluruh kota Pontianak termasuk pedagang kaki lima yang ada di Jalan Daya Nasional (Komplek Untan). Akan tetapi penertiban pedagang kaki lima yang ada di Kota Pontianak dapat dikatakan belum optimal, sebagai salah satu contohnya yang terjadi di Jalan Daya Nasional (Komplek untan) belum adanya ketegasan Pemerintah Kota untuk mengelola daerah ini secara khusus. Aparat keamanan seperti Satpol

PP saat ini hanya sesekali melakukan penertiban pedagang yang berjualan di sepanjang Jalan Daya Nasional.

2. Masyarakat atau pedagang kaki lima yang ada di Jalan Daya Nasional telah mengetahui tentang peraturan daerah yang telah di buat oleh Pemerintah Kota Pontianak mengenai pelarangan berjualan di pinggir jalan atau di atas badan jalan. Namun dengan berbagai alasan dan kebutuhan yang dihadapi oleh masyarakat maka masyarakat tetap ber jualan di sepanjang jalan tersebut.
3. Meningkatnya jumlah pedagang kaki lima yang ada di Jalan Daya Nasional sehingga menciptakan harapan baru bagi para pedagang, pedagan mengharapkan pemerintah dapat menyediakan tempat atau lahan baru yang resmi bagi mereka untuk berjualan dan mudah mendapatkan daya beli konsumen, yaitu di sekitar Jalan Daya Nasional (Komplek Untan) Kota Pontianak.

Saran

Saran yang dapat disampaikan dalam hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk pemerintah seharusnya Pemerintah Kota Pontianak harus lebih memperhatikan para pedagang kaki lima, harus lebih tegas lagi untuk memerintahkan aparat keamanannya seperti Satpol PP untuk selalu melakukan penertiban secara berkala, demi keaman dan kenyamanan daerah/tempat-tempat umum serta memfasilitasi para pedagang kaki lima agar mereka tetap bisa mencari nafkah namun tidak mengganggu ketertiban umum kota.
2. Untuk pedagang kaki lima, seharusnya lebih memperhatikan lokasi dan kebersihan kota, demi keamanan dan kenyamanan, baik pedagang maupun bagi pengguna jalan yang melalui daerah tersebut. Selain itu pedagang

harus menaati aturan yang telah di buat oleh pemerintah.

3. Untuk Universitas Tanjungpura seharusnya dapat berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Pontianak agar lebih memperhatikan para pedagang kaki lima yang ada di sekitar wilayah Universitas, yang dimana dengan jumlah pedagang kaki lima yang tidak sedikit dan terus bertambah, pemerintah harus bisa membatasi dan mengalokasikan lahan yang lebih luas bagi para pedagang untuk berjualan.

Daftar Pustaka

Ahmad, Ahmaddin. 2002. *Redesain Jakarta 2020*. Jakarta: Kota Press.

Almutahar, Hasan. 2020. *Sosiologi Perkotaan: Memahami Masyarakat Kota dan Problematikanya*. Pontianak: Top Indonesia.

Kismartini. 2019. Buku Ajar "Analisis Kebijakan Publik" Kerangka Dasar. Semarang: UNDIP PRESS.

Moleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdayakarya

Parid, Apep Insan AP. 2003. *Respon Pedagang Kaki Lima Terhadap Implementasi Kebijakan Penertiban di Kota Bandung (studi kasus di Jalan Merdeka)*, Jakarta.

Permadi, Gilang. 2007. *Pedagang Kaki Lima "Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini!"*. Jakarta: Yudhistira.

Suharto, Edi. 2012. *Analisis Kebijakan Publik (panduan praktis mengkaji masalah dan kebijakan sosial)*. Bandung: ALFABETA.

-----, 2013. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: AFABETA.

Swasono, Sri Edi. 2007. *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi: Membangun Ekonomi Nasional*. Jakarta: UI Press.

Jurnal Ilmiah:

Hambali, Khumaidi., dan Aminullah. 2016. "Analisis Kebijakan Perda No. 02 Tahun 2013 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Pasuruan Dalam Perspektif Ekonomi Politik". *Jurnal Sketsa Bisnis*. 3(2). <http://doi.org/10.35891:jsb.v3i2.579>. Diakses tanggal 27 April 2021.

Purnomo, Rachmat Aldy. 2016. Dampak Relokasi Terhadap Lingkungan Sosial Pedagang Kaki Lima di Pusat Kuliner Pratistha Harsa Purwokerto. *Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Eknomi*. 11(1). Doi:10.24269/ekuilibrium.v11i1.107 Diakses tanggal 27 April 2021.

Sarjono, J.J., Agus, S., dan Donatianus BSEP. 2014 "Peranan Pemerintah Dalam Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Pontianak Timur". *Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSS*. www.neliti.com/id/publications/9572. Diakses tanggal 9 Februari 2020.

Sugiyono. 2015. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA.

Skripsi:

Saputra, Andri Dwi. 2018. *(Analisis Pola Persebaran Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Karakteristik dan Keriteria Berdagang Di Jalan H. Rahman Sungai Jawi Dalam*

Kecamatan Pontianak Barat).
Skripsi. Pontianak: Program Studi
Perencanaan Wilayah Kota Jurusan
Teknik Sipil Fakultas Teknik
Universitas Tanjungpura Pontianak.

tentang-rencana-tata-ruang-wilayah.
Diakses tanggal 27 November 2020.

Wati, Lina. 2013. *Analisis Kebijakan
Pemerintah Kota Pekanbaru Untuk
Pengembangan dan Penataan Pasar
Tradisional (Study Kasus Pada
Pasar Pagi Arengka Pekanbaru)*.
Skripsi. Pekanbaru: Jurusan
Administrasi Negara Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan
Syarif Kasim Riau. Diakses melalui
[http://repository.uin-
suska.ac.id/9213/1/2013_2013350A](http://repository.uin-suska.ac.id/9213/1/2013_2013350A)
DN.PDF. Tanggal 26 February 2021

Website:

Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan
Perdagangan Kota Pontianak tahun
2019 melalui
[https://data.pontianakkota.go.id/data
set/data;pedagang-kaki-lima-di-kota-
pontianak-tahun-2019](https://data.pontianakkota.go.id/data-set/data;pedagang-kaki-lima-di-kota-pontianak-tahun-2019). Diakses
tanggal 20 April 2021

Perda Kota Pontianak Nomor 11 Tahun
2019 Tentang Ketertiban Umum.
Diakses melalui
[https://jdih.pontianakkota.go.id/perat
uran-daerah-kota-pontianak-nomor-
11-tahun-2019-tentang-ketertiban-
umum](https://jdih.pontianakkota.go.id/peraturan-daerah-kota-pontianak-nomor-11-tahun-2019-tentang-ketertiban-umum), diakses tanggal 27 February
2021.

Perda Kota Kota Pontianak Tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
Pontianak tahun 2013-2033. Diakses
melalui
[https://jdih.pontianakkota.go.id/perat
uran/peraturan-daerah-kota-
pontianak-nomor-2-tahun-2013-](https://jdih.pontianakkota.go.id/peraturan/peraturan-daerah-kota-pontianak-nomor-2-tahun-2013-)